



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 10253-10262

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021–2024

Lailita Syafaah¹, Putu Eka Dianita Mervilanti Dewi², I Gede Putu Banu Astawa³

¹²³Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha

¹lailita@student.undiksha.ac.id, ²ekadianita@undiksha.ac.id, ³banu.astawa@undiksha.ac.id

Abstrak

Lembaga keuangan berperan penting untuk mengelola resiko, hal ini menjadikan sektor asuransi memegang peranan yang krusial sebagai pilar kestabilan keuangan dalam masyarakat dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan Good Corporate Governance dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan dan mendorong terciptanya kinerja keuangan yang optimal. Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling dalam pemilihan sampel. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan asuransi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jumlah observasi yang digunakan sebanyak 61 data dari 16 perusahaan. Analisis data dilakukan melalui uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Sementara itu, Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak semua mekanisme tata kelola perusahaan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan asuransi secara efektif.

Kata Kunci: Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan.

1. Latar Belakang

Sektor asuransi memegang peranan krusial sebagai pilar kestabilan keuangan masyarakat dan negara. Sektor ini berfungsi sebagai penyangga risiko dengan mengumpulkan premi dari para pemegang polis, kemudian menginvestasikannya ke instrument produktif seperti obligasi pemerintah, saham, serta proyek infrastruktur yang mendukung pembangunan nasional. Perusahaan asuransi dituntut untuk memiliki kinerja keuangan yang solid guna menjamin pemenuhan kewajiban jangka panjang kepada pemegang polis, dimana kegagalan dalam hal ini dapat memicu efek domino terhadap kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan nasional yang sangat penting bagi perekonomian negara. Salah satu indikator utama yang mencerminkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dikelola yang sering kali mencapai triliunan rupiah dan bersifat likuid serta volatil adalah Return on Asset (ROA), yang menjadi ukuran penting untuk menilai seberapa efisien perusahaan tersebut dalam memanfaatkan sumber daya finansialnya untuk mencapai keuntungan maksimal. Industri asuransi di Indonesia memiliki peran penting dan strategis dalam mengelola risiko masyarakat yang beragam, mulai dari risiko kesehatan, kecelakaan, hingga risiko bisnis, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui mekanisme penyerapan premi yang signifikan, yang tercatat mencapai angka Rp 117,7 triliun pada tahun 2024 dengan pertumbuhan tahunan sebesar 5,7% yang menunjukkan resiliensi sektor ini di tengah dinamika pasar yang kompleks dan berfluktuasi [1]. Meskipun memiliki peran strategis tersebut, kontribusi aset industri asuransi Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat masih rendah, yakni hanya sebesar 5,32% pada tahun 2023 dan 5,1% per Maret 2025 menurut data OJK, jauh di bawah Malaysia yang mencapai 45,21% dan Singapura sebesar 11,4%. [2].

Pada periode 2021-2024 sektor asuransi ini menghadapi tantangan signifikan dan multidimensi, termasuk fluktuasi ekonomi global yang dipicu oleh ketidakstabilan geopolitik internasional, perubahan regulasi ketat dari Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, seperti implementasi Peraturan OJK Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Perusahaan Asuransi, Standar Akuntansi Keuangan PSAK 107 yang mengatur pengakuan dan pengukuran liabilitas asuransi, serta upaya penguatan permodalan dan tata kelola perusahaan yang lebih ketat untuk mencegah risiko sistemik. Pada subsektor asuransi jiwa, kinerja keuangan menunjukkan tren yang cenderung membaik selama periode 2021-2024. Laba setelah pajak tercatat sebesar Rp4,3 triliun pada tahun 2021, kemudian meningkat signifikan menjadi Rp11,3 triliun pada tahun 2022. Meskipun mengalami penurunan menjadi Rp6,7 triliun pada tahun 2023, laba kembali meningkat menjadi Rp8,9 triliun pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi jiwa mampu mempertahankan kinerja keuangannya meskipun masih mengalami fluktuasi pada beberapa periode. Subsektor asuransi umum justru mengalami kondisi yang kurang stabil. Pada periode 2021-2023, laba setelah pajak masih berada pada kondisi yang relatif stabil. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang sangat drastis hingga mencatatkan kerugian sekitar Rp8 triliun. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya tekanan terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi umum yang diduga dipengaruhi oleh meningkatnya beban klaim akibat bencana alam, risiko operasional, serta peningkatan cadangan teknis untuk memenuhi kewajiban jangka panjang [3].

Ketidakstabilan kinerja keuangan yang terlihat dari data di atas memperkuat urgensi penerapan Good Corporate Governance (GCG) sebagai elemen krusial yang tidak dapat diabaikan untuk menjaga keberlanjutan operasional jangka panjang, meningkatkan ketahanan industri terhadap tantangan eksternal, serta memastikan perlindungan maksimal bagi pemegang polis dan kontribusi positif terhadap stabilitas sistem keuangan nasional secara keseluruhan. Pemegang saham institusional wajib melindungi minoritas dari dominasi mayoritas, menggunakan hak suara secara independen di RUPS, mengawasi transaksi material dengan pihak berelasi, mengidentifikasi benturan kepentingan, serta mengungkapkan posisi dan voting dalam laporan keuangan. Komite Audit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris bertanggung jawab atas prinsip 5 PUGKI 2021 (Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Kepatuhan). Tugasnya mencakup menelaah laporan keuangan sebelum disetujui, mengevaluasi independensi auditor internal/eksternal, memantau efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), menangani pengaduan pelanggaran akuntansi atau etik, serta merekomendasikan perbaikan audit dengan rapat minimal empat kali setahun menggunakan pendekatan "Apply or Explain" [4].

Perusahaan yang mengadopsi GCG secara optimal biasanya menunjukkan kinerja yang lebih unggul dan mampu menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham [5]. Meskipun prinsip-prinsip PUGKI 2021 dirancang untuk mencegah penyimpangan tersebut, realitas di lapangan menunjukkan kegagalan penerapan GCG yang menyebabkan beberapa perusahaan asuransi mengalami penurunan kinerja hingga kebangkrutan. Salah satu kasus mencolok adalah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Life (Wanaartha Life) adalah manipulasi laporan keuangan hingga mencapai nilai sekitar Rp 17 Triliun, yang melibatkan tindakan tidak etis dari dewan komisaris dan direksi perusahaan [6]. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Wanaartha Life kepada masyarakat dan regulator tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya. Pada tahun 2019, perusahaan melaporkan kewajiban sebesar sekitar Rp 3,7 Triliun dan aset sebesar Rp 4,7 Triliun sehingga ekuitas dilaporkan positif sebesar Rp 977 miliar, padahal kenyataannya kondisi keuangan lebih buruk dengan ekuitas negatif mencapai Rp 10,18 Triliun akibat disparitas besar antara kewajiban dan aset [7]. Manipulasi tersebut dilakukan dengan mengurangi jumlah premi yang tercatat dan data pemegang polis, sehingga terjadi perbedaan besar antara premi yang sebenarnya diterima dengan yang dilaporkan; dari total premi sebesar Rp 13 Triliun, yang tercatat hanya sekitar Rp 3 Triliun. Selain itu, perusahaan diduga mengalirkan dana untuk kepentingan pribadi para pejabat puncak, termasuk biaya hiburan dan perjalanan yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Manipulasi ini menyebabkan perusahaan gagal membayar klaim nasabah senilai triliunan rupiah, hingga akhirnya OJK mencabut izin usaha Wanaartha Life pada akhir 2022 karena ketidakmampuan memenuhi rasio solvabilitas yang diwajibkan. Kasus ini mencerminkan kegagalan penerapan prinsip GCG [8]. Selain kasus gagal bayar klaim yang mencapai triliunan rupiah, terdapat dugaan tindak pidana penggelapan dana dan pencucian uang yang terkait dengan pengelolaan dana perusahaan. Direktur Utama Kresna Life telah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian atas dugaan penggelapan polis dan pencucian uang. Sementara itu, pemilik grup Kresna, Michael Steven, ditetapkan sebagai buronan Interpol terkait kasus ini [9].

Adapun penelitian terdahulu yang membahas kesenjangan pada penelitian serupa [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]. Berdasarkan beberapa penelitian yang terdahulu, masih terdapat kesimpulan yang belum konsisten atau adanya research gap. Penelitian yang dilakukan oleh [16] dengan judul penelitian Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2022, menunjukkan Dewan Komisaris dan Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun Komite Audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Sementara itu, [22] menemukan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan

dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Di sisi lain, [23] menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang diangkat untuk memfokuskan permasalahan yang diangkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penerapan Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Variabel yang menjadi fokus analisis meliputi jumlah anggota dewan komisaris, kepemilikan saham institusional, serta keberadaan komite audit. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 sampai 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “Pengaruh Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024”, guna mengatasi kesenjangan penelitian dari temuan yang belum konsisten, menjawab permasalahan riil seperti kegagalan GCG pada kasus Wanaartha Life dan Kresna Life yang mengakibatkan manipulasi laporan keuangan serta pencabutan izin usaha, serta menyediakan rekomendasi praktis bagi regulator dan pelaku industri untuk memperkuat tata kelola perusahaan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif hubungan kausal untuk menguji pengaruh dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) subsektor asuransi periode 2021–2024. Pendekatan kuantitatif berbasis positivisme ini melibatkan pengumpulan data numerik dan analisis statistik untuk mengkonfirmasi hipotesis, fokus pada hubungan kausal antara variabel independen dan dependen. Penelitian ini bersifat eksplanatori. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling method. Kriteria pemilihan sampel yang pertama perusahaan asuransi yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI selama periode 2021–2024 (dengan jumlah 18), kedua perusahaan Asuransi yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan secara berturut-turut untuk periode 2021-2024 (dengan jumlah 0), ketiga perusahaan Asuransi yang memiliki kelengkapan data dalam periode 2021-2024 seperti Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit (dengan jumlah 2), serta keempat Perusahaan Asuransi yang menyediakan laporan keuangan dengan mata uang rupiah (dengan jumlah 0). Total jumlah sampel sebanyak 16. Jumlah pengamatan dilakukan selama 4 tahun dengan total 64. 3 sampel dikeluarkan agar data dapat terdistribusi secara normal sehingga total sampel dalam penelitian ini berjumlah 61. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Dewan Komisaris (X_1), Kepemilikan Institusional (X_2), dan Komite Audit (X_3). Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan (Y). Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengolah literatur, artikel, jurnal maupun media tertulis lain yang berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian ini. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data dokumenter seperti laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Data diambil dari situs resmi BEI (www.idx.co.id), situs resmi masing-masing perusahaan asuransi, serta database lain yang relevan, seperti laporan OJK. Data yang telah dikumpulkan diolah dan diuji secara statistik menggunakan perangkat lunak Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 27.

Dalam penelitian ini terdapat metode statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan data dari setiap variabel yang diteliti. Untuk melihat keabsahan data dilakukan Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas dimana untuk mendeteksi normalitas residual data dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan taraf signifikan 5 persen. Dasar pengambilan keputusan nilai $Sig > 0,05$ maka dikatakan berdistribusi normal. Jika nilai $Sig < 0,05$ maka dikatakan berdistribusi tidak normal. Uji Multikolineritas digunakan dua indikator utama, yaitu nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) > 10 maka hasilnya akan menunjukkan bahwa variabel tersebut akan memiliki masalah multikolineritas dengan variabel bebas lainnya. Sedangkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) ≤ 10 lebih kecil sama dengan 0.1 (tolerance ≤ 0.10) maka menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak terjadi masalah multikolineritas dengan variabel bebas lainnya. Uji Heteroskedastisitas, model yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji Glejser. Metode Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel bebas. Model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi variabel bebasnya terhadap nilai absolute residual lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Uji Autokorelasi, pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan kriteria DW tabel dengan tingkat signifikansi 5%. Selain itu diperlukan Uji Hipotesis yang terdiri dari Analisis Regresi Linier Berganda untuk menguji pengaruh dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap kinerja keuangan (ROA). Uji t untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Uji Koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Deskripsi Data

Tabel 1. Statistik Deskriptif					
Deskriptif Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Dewan Komisaris	61	1,10	1,79	1,3577	0,23751
Kepemilikan Institusional	61	-0,55	4,58	4,1388	0,73132
Komite Audit	61	0,69	1,39	1,1297	0,11310
Kinerja Keuangan	61	-2,16	3,94	0,5579	1,10159
Valid N (listwise)	61				

Berdasarkan Tabel 1, jumlah data (N) yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 61 observasi. Variabel Dewan Komisaris menunjukkan bahwa data dewan komisaris relatif homogen karena nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata, sehingga penyebaran datanya tidak terlalu besar. Variabel Kepemilikan Institusional menunjukkan bahwa variasi data masih tergolong cukup terkendali meskipun rentang datanya cukup lebar. Variabel Komite Audit menunjukkan bahwa data komite audit cenderung stabil dan tidak mengalami fluktuasi yang besar karena penyebaran datanya kecil. Variabel Kinerja Keuangan menunjukkan bahwa data kinerja keuangan memiliki tingkat variasi yang cukup tinggi, sehingga terdapat perbedaan kinerja yang cukup signifikan antar sampel dalam penelitian ini.

3.2 Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Uji Normalitas		
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		61
Normal Parameters	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,03683062
Most Extreme Differences	Absolute	0,060
	Positive	0,058
	Negative	-0,060
Test Statistic		0,060
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200

Berdasarkan Tabel 2, Uji Normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai Asymp.Sig sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan, yaitu 0,05 ($0,200 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan terpenuhinya

asumsi normalitaas, maka model regresi dalam penelitian ini layak untuk digunakan dalam pengujian selanjutnya karena salah satu asumsi klasik telah terpenuhi.

Tabel 3. Uji Multikolineritas

Coefficient		
Collinearity Statistic		
	Tolerance	VIF
Model		
1 (Constant)		
DK	,979	1,021
KI	,998	1,002
KA	,978	1,023

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji multikolineritas diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,10 dan VIF dibawah 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolineritas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 4. Uji Heterokedastisitas

Coefficients					
Model	Unstandarized B	Coefficients Std. Error	Standarized Coefficients Beta	t	Sig
1 (Constants)	1,277	0,946		1,350	0,182
DK	0,167	0,331	0,067	0,506	0,615
KI	0,014	0,106	0,017	0,129	0,898
KA	-0,634	0,695	-0,121	-0,913	0,365

Berdasarkan Tabel 4, Hasil uji heterokedastisitas pada seluruh variabel independen nilai signifikansi diatas 0,05, yaitu Dewan Komisaris sebesar 0,615, Kepemilikan Institusional sebesar 0,898, dan Komite Audit sebesar 0,365. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala heterokedastisitas, sehingga memenuhi asumsi homokedastisitas.

Tabel 5. Uji Autokolerasi

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,338	0,114	0,067	0,60377	1,782

Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai DW diperoleh sebesar 1,782. Berdasarkan jumlah sampel dan nilai DW tersebut didapatkan nilai dL sebesar 1,4847, dU 1,6904, dan didapatkan nilai 4-dU sebesar 2,3096 sehingga dapat diartikan $dL < d < 4 - dU$. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan nilai Durbin-Watson maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

3.3 Uji Hipotesis

Tabel 6. Analisis regresi linier berganda

Coefficients		
Model	Unstandarized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	2,133	1,671
DK	0,442	0,584
KI	-0,487	0,188
KA	-0,142	1,228
a. Dependen Variabel : Kinerja Keuangan		

Berdasarkan Tabel 6, maka diperoleh model persamaan regresi linier bergandanya $Y = 2,133 + 0,442 (X1) - 0,487 (X2) - 0,142 (X3) + e$. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit bernilai 0, maka Kinerja Keuangan sebesar 2,133. Nilai koefisien regresi dewan komisaris sebesar 0,442, menunjukkan arah hubungan positif, yang berarti setiap peningkatan Dewan Komisaris sebesar 1 satuan akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,442 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai koefisien regresi Kepemilikan Institusional sebesar -0,487 menunjukkan arah hubungan negatif, yang berarti setiap peningkatan Kepemilikan Institusional sebesar 1 satuan akan menurunkan kinerja keuangan sebesar 0,487 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai koefisien regresi Komite Audit sebesar -0,142 menunjukkan arah hubungan negatif, yang berarti setiap peningkatan Komite Audit sebesar 1 satuan akan menurunkan kinerja keuangan sebesar 0,142 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 7. Uji t

Coefficients					
Model	Unstandarized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig
	B	Std. Error			
1 (Constant)	2,133	1,671		1,277	0,207
DK	0,442	0,584	0,095	0,756	0,453
KI	-0,487	0,188	-0,323	-2,590	0,012
KA	-0,142	1,228	-0,015	-0,116	0,908

Berdasarkan Tabel 7, Variabel Dewan Komisaris memiliki nilai t hitung sebesar 0,756 dengan nilai signifikan sebesar 0,453. Karena nilai signifikan $0,453 > 0,05$ maka variabel Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Selain itu, nilai koefisien regresi sebesar 0,442 menunjukkan arah pengaruh positif, artinya peningkatan Dewan Komisaris cenderung meningkatkan kinerja keuangan, namun pengaruhnya tersebut tidak cukup kuat secara statistik sehingga hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak. Variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai t hitung sebesar -2,590 dengan nilai signifikansi sebesar 0,012. Karena nilai signifikansi $0,012 < 0,05$, maka variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Nilai koefisien regresi sebesar -0,487 menunjukkan arah pengaruh negatif, yang berarti semakin tinggi kepemilikan institusional maka kinerja keuangan cenderung menurun. Dengan demikian, hipotesis diterima.

dengan arah pengaruh negatif signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak. Variabel Komite Audit memiliki nilai t hitung sebesar -0,116 dengan nilai signifikansi sebesar 0,908. Karena nilai signifikansi $0,908 > 0,05$, maka variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Nilai koefisien regresi sebesar 0,142 menunjukkan arah pengaruh negatif, namun karena tidak signifikan secara statistik maka pengaruh tersebut tidak dapat dijadikan dasar bahwa komite audit mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak.

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,338	0,114	0,067	1,06377	1,782

Berdasarkan Tabel 8, diperoleh koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,067. Hal ini berarti variasi dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan komite audit dapat mempengaruhi variabel kinerja keuangan sebesar 6,7% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

3.4 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian, variabel dewan komisaris memiliki nilai t hitung sebesar 0,756 yang lebih kecil dari t tabel sebesar 1,672 ($0,756 < 1,672$) serta nilai signifikansi sebesar 0,453 yang lebih besar dari 0,05 ($0,453 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Nilai koefisien regresi Dewan Komisaris sebesar 0,442 memang menunjukkan arah positif, namun karena tidak didukung oleh nilai signifikansi yang memadai, maka pengaruh tersebut tidak dapat dinyatakan bermakna secara statistik. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan dinyatakan ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan dewan komisaris dalam struktur tata kelola perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kinerja keuangan. Kondisi ini terjadi karena fungsi pengawasan yang semestinya dijalankan Dewan Komisaris belum berjalan secara optimal dalam mendorong efektivitas manajemen, terutama dalam aspek pengambilan keputusan strategis yang berpengaruh langsung terhadap profitabilitas perusahaan.

Dalam perspektif agency theory, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik di perusahaan asuransi Indonesia. Kondisi serupa juga dikonfirmasi oleh Fama dan Jensen (1983) yang menyatakan bahwa efektivitas dewan tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya secara struktural, melainkan oleh kapasitas dan keaktifan anggotanya dalam menjalankan fungsi kontrol [24].

Kondisi ini juga dapat dijelaskan melalui perspektif Teori Institusional DiMaggio & Powell Dalam konteks perusahaan asuransi di Indonesia, pembentukan dewan komisaris lebih didorong oleh keharusan memenuhi ketentuan OJK melalui POJK No. 33/POJK.04/2014 daripada kebutuhan nyata untuk meningkatkan kualitas pengawasan. Akibatnya, dewan komisaris yang terbentuk cenderung berfokus pada pemenuhan syarat formal seperti jumlah anggota, tanpa diikuti dengan aktivitas pengawasan yang aktif terhadap kebijakan strategis direksi yang berdampak langsung pada profitabilitas [13]. Hal ini sejalan dengan temuan [25] [26] yang menyimpulkan bahwa dewan komisaris yang pembentukannya berorientasi pada kepatuhan regulasi cenderung tidak memberikan dampak nyata terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dalam kondisi demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang banyak tidak serta-merta mencerminkan kualitas pengawasan yang tinggi, melainkan justru dapat memunculkan inefisiensi struktural yang berujung pada lemahnya pengaruh terhadap kinerja keuangan [19]. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil beberapa penelitian terdahulu [28] dalam penelitiannya pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI periode 2017-2019 menemukan bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dan menyimpulkan bahwa banyak atau sedikitnya Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan belum dapat mencerminkan baik buruknya kinerja keuangan sebuah perusahaan. [13] dalam penelitiannya pada perusahaan yang terdaftar di BEI menyimpulkan bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. [26] Dalam penelitiannya menyatakan bahwa Dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, karena pengawasan yang

dilakukan cenderung bersifat administratif dan tidak menyentuk aspek strategis yang mempengaruhi profitabilitas secara langsung. [25] Dalam penelitiannya juga menemukan bahwa Dewan Komisaris secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. [18] Juga menyatakan dalam penelitiannya pada perusahaan pertambangan di BEI periode 2018-2022 juga menemukan bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini memperkuat pandangan bahwa yang terpenting bukan seberapa besar ukuran Dewan Komisaris, melainkan seberapa efektif Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara nyata dalam operasional perusahaan.

3.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial (uji t), variabel Kepemilikan Institusional memperoleh nilai t hitung sebesar -2,590. Dalam pengujian uji t, nilai t hitung yang bernilai negatif dapat disederhanakan ke dalam bentuk absolut atau mutlak [29], sehingga menjadi $|-2,590| = 2,590$. Dengan demikian, nilai absolut t hitung tersebut lebih besar dibandingkan t tabel sebesar 1,672 ($2,590 > 1,672$), disertai nilai signifikansi sebesar 0,012 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,012 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Nilai koefisien regresi Kepemilikan Institusional sebesar -0,487 menunjukkan arah hubungan yang negatif, yang berarti setiap peningkatan satu satuan kepemilikan institusional akan menurunkan kinerja keuangan sebesar 0,487. Dengan demikian, meskipun kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, arah pengaruhnya berlawanan dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan dinyatakan ditolak. Hasil ini bertentangan dengan prediksi awal yang didasarkan pada agency theory Jensen dan Meckling (1976), di mana kepemilikan institusional seharusnya berperan sebagai mekanisme monitoring eksternal yang aktif. Hasil penelitian ini justru menunjukkan arah yang berlawanan, dimana semakin besar porsi kepemilikan institusional, kinerja keuangan yang diukur melalui ROA justru mengalami penurunan.

Entrenchment Theory menjelaskan bahwa ketika pemegang saham besar memiliki kendali yang terlalu dominan, mereka berpotensi menggunakannya untuk kepentingan kelompok mereka sendiri bukan untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan [30]. Kondisi ini disebut entrenchment effect, yaitu situasi dimana pemegang saham dominan mengarahkan sumber daya perusahaan ke arah yang menguntungkan institusinya sendiri namun justru merugikan profitabilitas perusahaan [31]. Perspektif ini relevan untuk menjelaskan temuan penelitian ini, di mana perusahaan asuransi dengan konsentrasi kepemilikan institusional yang tinggi justru menunjukkan nilai ROA yang lebih rendah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil beberapa peneliti terdahulu [31] dalam penelitiannya menemukan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. [15] Menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, yang mengindikasikan bahwa dominasi pemegang saham institusional di pasar modal Indonesia belum tentu mendorong efisiensi manajemen secara positif. [10] Dalam penelitiannya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI menemukan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, mengindikasikan bahwa kehadiran investor institusional tidak selalu memberikan dampak terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. [32] Menyimpulkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan, mengindikasikan bahwa faktor lain mungkin lebih dominan dalam menentukan performa finansial perusahaan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa dalam konteks pasar modal Indonesia, khususnya pada sektor asuransi tingginya kepemilikan institusional tidak selalu mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Bahkan kondisi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap kinerja keuangan apabila kepentingan investor institusional tidak sejalan dengan tujuan peningkatan profitabilitas perusahaan.

3.6 Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial (uji t), variabel Komite Audit memperoleh nilai t hitung sebesar -0,116 yang lebih kecil secara absolut dibandingkan t tabel sebesar 1,672 ($|-0,116| < 1,673$), disertai nilai signifikansi sebesar 0,908 yang lebih besar dari 0,05 ($0,908 > 0,05$). Nilai koefisien regresi Komite Audit sebesar -0,142 menunjukkan arah hubungan negatif, namun karena tidak didukung oleh nilai signifikansi yang memadai, maka pengaruh tersebut tidak dapat dinyatakan bermakna secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan dinyatakan ditolak.

Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit dalam struktur tata kelola perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan yang diukur melalui ROA. Dalam perspektif agency theory Jensen dan Meckling (1976), komite audit seharusnya berperan sebagai mekanisme pengawasan yang mampu memperkecil asimetri informasi antara manajemen (agen) dan pemegang saham (principal), dengan cara memastikan integritas laporan keuangan dan efektivitas pengendalian internal. Secara teoritis, komite audit yang berfungsi dengan baik seharusnya mampu menekan risiko manipulasi laporan keuangan dan mendorong efisiensi operasional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan ROA. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak terbukti secara statistik pada perusahaan asuransi di BEI periode 2021-2024.

Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil beberapa peneliti terdahulu [13] menyimpulkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. [14] Dalam penelitiannya pada perusahaan BUMN sektor keuangan menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, mengindikasikan bahwa keberadaan komite audit saja tidak cukup untuk mendorong profitabilitas. [18] Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan di BEI, karena fungsinya lebih bersifat administratif daripada strategi. [19] Dalam penelitiannya menemukan bahwa komite audit justru berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, yang menguatkan argumen bahwa penambahan jumlah anggota komite audit secara mekanisme tidak menjamin peningkatan kualitas pengawasan. [32] Menyimpulkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, mengindikasikan bahwa efektivitas Komite Audit bervariasi tergantung pada konteks perusahaan dan lingkungan operasionalnya. [28]. Dalam penelitiannya khusus pada perusahaan asuransi di BEI juga menemukan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, hasil yang sangat relevan karena berasal langsung dari sektor yang sama dengan penelitian ini. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa ukuran Komite Audit semata tidak cukup menjadi indikator yang andal bagi peningkatan kinerja keuangan. Kualitas, kompetensi, dan keaktifan Komite Audit dalam menjalankan fungsinya yang sesungguhnya menentukan efektivitas organ tata kelola perusahaan tersebut.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian, disimpulkan bahwa secara keseluruhan, ketiga mekanisme Good Corporate Governance yang diteliti belum terbukti mampu mendorong peningkatan kinerja keuangan perusahaan asuransi secara signifikan. Temuan ini memberikan implikasi penting bahwa penerapan GCG di perusahaan asuransi Indonesia perlu dimaknai lebih dari sekadar memenuhi persyaratan formal regulasi. Keberhasilan GCG dalam mendorong kinerja keuangan sangat bergantung pada sejauh mana setiap organ tata kelola menjalankan fungsinya secara aktif, kompeten, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang perusahaan serta seluruh pemangku kepentingannya. Perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI disarankan untuk tidak hanya memenuhi ketentuan minimum jumlah anggota Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit sebagaimana diwajibkan oleh regulasi OJK, tetapi juga meningkatkan kualitas dan efektivitas fungsi pengawasan masing-masing organ tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disarankan untuk memperkuat regulasi yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan jumlah (kuantitas) organ tata kelola, tetapi juga pada evaluasi kualitas dan efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan. Investor yang akan menanamkan modal di perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI disarankan untuk tidak hanya memperhatikan aspek kepemilikan institusional sebagai indikator tata kelola yang baik, karena penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan institusional yang tinggi justru berpotensi menurunkan kinerja keuangan.

Referensi

1. Budi, H., & Sumarni. (2026). Pengaruh Isomorfisme Institusional terhadap Praktik Tata Kelola Perusahaan dengan Tekanan Regulasi pada Perusahaan Publik di Indonesia. 4(02), 378–389. <https://doi.org/10.58812/smb.v4i02>
2. Addina, C., Harmain, H., & Syahriza, R. (2023). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 11(1), 135–146. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i1.1616>
3. Rohman, I. K., Hafidh, E. P., Melati, R., & Serpina, N. (2024). Insurance Quarterly Report. IFG Progress.
4. Fatmawati, Sinta, & Alliyah, S. (2023). Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA), XI(1), 50–62.
5. Sonbay, Y. Y. (2022). Kritik Terhadap Pemberlakuan Teori Agensi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Suku Boti. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 6(2). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5176>
6. Tempo.co. (2025). Sejarah Kasus Wanaartha yang Dilaporkan ke OJK. <https://www.tempo.co/ekonomi/sejarah-kasus-wanaartha-yang-dilaporkan-ke-ojk-1825424>
7. Zulfikar, M. (2022). OJK Cabut Izin Usaha Wanaartha Life, Dugaan Rekayasa Laporan Keuangan hingga Permohonan Pailit. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha-di-Bidang-Asuransi-Jiwa-Atas-PT-Asuransi-Jiwa-Adisarana-Wanaartha.aspx>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10502>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

8. Malik, A. A., Usnan, A., Bestari, Q., Maryam, S., & Siswajanthi, F. (2025). Analisa Kasus Penggelapan Dana Asuransi dan Divestasi Izin Operasi PT Wanaartha Life oleh OJK. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 1(1), 15–32.
9. Agustinus Rangga Respati, E. D. (2023). Kronologi Kasus Krena Life Sebelum Pencabutan izin usaha. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2023/06/27/081000326/kronologi-kasus-kresna-life-sebelum-pencabutan-izin-usaha>
10. Putri, Z. (2021). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Satya Negara Indonesia. Repository.Usni.Ac.Id. <https://repository.usni.ac.id/repository/9152235b5ec386a54bfb2e0149c8e35.pdf>
11. Sitanggang, A. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2016-2018). *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 7(2), 181–190. <https://doi.org/10.54367/jrak.v7i2.1401>
12. Margaret, E. (2022). Pengaruh Good Corporate Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
13. Bacin, K. A., & Harmain, H. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2020. *Owner*, 6(4), 3714–3723. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1124>
14. Fajri, F., Akram, & Mariadi, Y. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Bumh Sektor Keuangan. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 307–320. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i2.229>
15. Yulianti, A., & Cahyonowati, N. (2023). Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 12(1), 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/40175/29430>
16. Prakoso, T. (2023). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Aleph*, 87(1,2), 149–200. <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proces>
17. Nawarisa, E., Br, K., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Mercu, U., Yogyakarta, B., Bantul, K., Utami, E. S., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Mercu, U., Yogyakarta, B., & Bantul, K. (2023). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP. 9(2), 503–510.
18. Lukito, H., & Abubakar Arief. (2024). Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 1111–1122. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i2.21012>
19. Sifananda, M. A., Kusbandiyah, A., Fakhruddin, I., & Winarni, D. (2024). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Lverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 09(1), 37–48.
20. Devi, S., Dewi, L. G. K., & Dewi, P. E. D. M. (2019). Peranan Komitmen Profesi Akuntan Dalam Memoderasi Pengaruh Client Importance Pada Kualitas Audit. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 4(1), 540–559. <https://doi.org/10.31093/jraba.v4i1.141>
21. Devi, S., Ratnadi, N. M. D., Musmini, L. S., & Masdiantini, P. R. (2025). Erm power on support the role of psak 71 in saving banking finances during the covid-19 pandemic. *Contaduria y Administracion*, 70(2), 251–284. <https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2025.5329>
22. Sutrisno, Y. A. E., & Riduwan, A. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntans*, 11(11), 1–22. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4924>
23. Syadeli, M., & Sa'adah, L. (2021). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan. *Adbis Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15(1), 28–40.
24. Saputra, A. A. D., & Wardhani, R. (2017). Pengaruh efektivitas dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional terhadap efisiensi investasi. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 21(1), 24–36. <https://doi.org/10.20885/jai.vol21.iss1.art3>
25. Oktapiani, K. R., & Sulindawati, N. L. G. E. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. *Jurnal Ekobismen*, 2(1), 86–102. <https://doi.org/10.47647/jeko.v2i1.537>
26. Hartati, N. (2020). Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *EKOMABIS: Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*, 1(02), 175–184. <https://doi.org/10.37366/ekomabis.v1i02.72>
27. Prabowo, A. (2022). Apakah Manajemen Laba dan Tipe Struktur Kepemilikan Institusional dapat Meningkatkan Nilai Perusahaan? *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 15(1), 371–380. <https://doi.org/10.35143/jakb.v15i1.4753>
28. Permata, R. A. B., & Putra, I. S. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 9(02), 66–75. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.9.02.66-75>
29. Hartanto, D. P. (2024). The Student's T Distribution "T Table." *Arena Statistic*. <https://www.arenastatistics.com/t-table>
30. Sun, P., Ma, S., & Xu, X. (2022). Multi-Factor Collaborative Governance of Controlling Shareholder Expropriation Behavior in Emerging Economies: A Perspective of Double Principal-Agent Conflicts. *SAGE Open*, 12(2). <https://doi.org/10.1177/21582440221097403>
31. Ariyani, V., & Sukoco, Y. D. (2023). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(4), 299–308. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i4.1930>
32. Sembiring, Y. C. B. (2020). production editor akuntansi, +8.+Yan+Christin+Br.+Sembiring. *Jurnal Universitas Sari Mutiara Indonesia*, 5(1), 91–100. <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/article/view/1186>
33. Fernanda, D., Isnunwardhana, D., Zultilisna, D., Ekonomi, F., & Telkom, U. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan , Leverage , dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Sektor Basic Materials Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022) The Influence of Company Size , Leverage , and Good C. 11(6), 6464–6475.